

**KUASA PEREMPUAN BALI:
PERAN DAN KAPASITAS PEREMPUAN BALI DALAM MENGHADAPI ERUPSI
GUNUNG AGUNG**

**Megasari Noer Fatanti¹, Ary Budiyanto², I Kadek Yudi Astawan³, Cindy Nirmala W.⁴,
Nur May Alfian⁵, Tri Susanti⁶**

¹Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Malang
megasari.fatanti.fis@um.ac.id

ABSTRAK

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa wanita memiliki risiko 14 kali lebih tinggi untuk menjadi korban bencana daripada pria dewasa. Ini disebabkan oleh naluri wanita yang ingin melindungi keluarga dan anak-anak mereka, yang sering membuat mereka mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kesiapan wanita di Desa Besakih dalam menghadapi erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. Melalui metode etnografi dengan teknik pengumpulan data seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur, penelitian ini menemukan beberapa potensi perempuan Bali ketika menghadapi bencana. Karakter wanita Bali yang mandiri, tangguh dan adaptif adalah kunci mereka untuk bertahan hidup dalam situasi bencana. Selain itu, wanita dari Desa Besakih mengaku secara aktif mencari informasi tentang bencana Gunung Agung melalui media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp sebagai bentuk mitigasi diri sebelum bencana terjadi. Rekomendasi penelitian diarahkan pada perlunya peningkatan *skill* bagi perempuan-perempuan yang tinggal di kawasan rawan bencana di Pulau Bali agar tetap berdaya secara ekonomi maupun sosial. Beberapa materi pelatihan diantaranya bagaimana mengenali gejala awal bencana, bagaimana mencari informasi kebencanaan yang akurat melalui media sosial atau portal berita daring, serta meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan ekonomi pasca bencana.

Kata kunci: Perempuan Bali, Pengurangan Risiko Bencana, Gunung Agung, Triple Roles

ABSTRACT

Data from the National Disaster Management Agency (BNPB) states that women have a 14 times higher risk of becoming disaster victims than adult men. This is due to the instinct of women wanting to protect their families and children, which often makes them neglect their safety. This article aims to reveal the readiness of women in Besakih Village to face the eruption of Mount Agung in Karangasem Regency, Bali. Through ethnographic methods with data collection techniques such as participant observation, in-depth interviews, and literature studies, this study found several potentials of Balinese women when facing disasters. Balinese women who are independent, tough, and adaptive are key to survive in disaster situations. In addition, women from Besakih Village claimed to actively seek information about the Mount Agung disaster through social media, such as Facebook and WhatsApp, as a form of self-

² Program Studi Antropologi, Universitas Brawijaya
arybudhi@ub.ac.id

³ Program Studi Seni Rupa Murni, Universitas Brawijaya
yudiastawan@ub.ac.id

⁴ Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya
cindy.nirmala@gmail.com

⁵ Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya
nurwahyu42@gmail.com

⁶ Program Studi Antropologi, Universitas Brawijaya
trissusan43@gmail.com

mitigation before the disaster occurred. Research recommendations are directed at the need to increase skills for women living in disaster-prone areas on the island of Bali in order to remain economically and socially empowered. Some of the training materials include recognizing the early symptoms of a disaster, finding accurate disaster information through social media or online news portals, and increasing women's capacity through post-disaster economic empowerment.

Keywords: Balinese Women, Disaster Risk Reduction, Mount Agung, Natural Disaster, Triple Roles

PENDAHULUAN

Kesadaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah berkembang secara global. Indonesia sebagai negara yang memiliki indeks kerentanan bencana yang tinggi, menjadi bagian dari kesepakatan dalam konferensi pengurangan risiko bencana tingkat dunia yang dikenal dengan kerangka kerja *Sendai 2015-2030* (UNISDR, 2015). Konferensi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah negara dan internasional, organisasi, masyarakat dan swasta, dalam PRB (UNISDR, 2008). Indonesia sebagai negara yang terletak di jalur gempa bumi dan gunung berapi aktif (*ring of fire*) memiliki peran dan tanggung jawab lebih dalam pengurangan risiko bencana, khususnya menghadapi bencana vulkanologis. Kejadian bencana tentunya akan membawa dampak bagi seluruh makhluk hidup, namun yang sering terlupakan adalah dampak dan beban yang mungkin diterima oleh laki-laki dan perempuan dapat berbeda (Murtakhamah, 2013). Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam *Sendai Framework* tersebut adalah pengarusutamaan gender, terutama melibatkan perempuan secara aktif sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana. Mengutip temuan dari *Resilience Development Initiative* (2011) dijelaskan bahwa perempuan memiliki risiko lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki ketika bencana terjadi. Senada dengan pendapat sebelumnya, Mehta (2007) menyebutkan selama bencana topan melanda Bangladesh tahun 1991, tingkat kematian perempuan yang berusia di atas sepuluh tahun tiga kali lebih tinggi daripada laki-laki.

Temuan lain dari hasil riset Chew & Ramdas (2005) disebutkan, ketika tsunami melanda Asia ditemukan tingkat kematian perempuan lima kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Salah satu penyebab tingginya tingkat kematian yang dialami perempuan adalah sifat 'rentan' dari perempuan sendiri. Menurut Ginige, Amaratunga, & Haigh (2008) tingkat kerentanan seseorang dapat dipengaruhi oleh empat hal yaitu kerentanan fisik (misal: kedekatan jarak antara masyarakat dan properti dengan faktor pemicu bencana, konstruksi bangunan yang tidak tepat, serta degradasi lingkungan), kerentanan sosial (misal: tingkat literasi dan pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan nilai-nilai tradisional), kerentanan ekonomi (biasanya dialami oleh masyarakat yang termasuk dalam kelas atau kasta yang lebih rendah, etnis minoritas, usia yang sangat muda dan tua), dan kerentanan lingkungan (mengacu pada tingkat degradasi sumber daya alam). Keempat faktor kerentanan tersebut dapat dialami oleh perempuan saat bencana terjadi.

Contohnya pada peristiwa erupsi Merapi tahun 2010. Nastiti, Firawati, Hieriej, & Prabandari (2016) menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan perempuan lebih rentan selama bencana erupsi Gunung Merapi, seperti terbatasnya akses informasi dan mobilitas perempuan; bertambahnya peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga; dan BPBD belum memiliki pemetaan berbasis gender secara lengkap dan spesifik untuk menilai kerentanan dan kapasitas masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu tentang pentingnya pelibatan perempuan dalam pengurangan risiko bencana (Krishnaraj, 1997; Alagan & Aladuwaka, 2011; Fothergill, 1999; Alam & Rahman, 2014; Valdes, 2009; Juran, 2012; Sohrabizadeh, 2016) menemukan permasalahan yang hampir mirip yaitu rendahnya pelibatan perempuan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, aksesibilitas informasi yang rendah bagi perempuan sehingga mereka tidak mengetahui harus melakukan apa ketika bencana terjadi, dan kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga terdampak dengan diwakilkan oleh laki-laki. Selain kerentanan ekonomi, penelitian Ray-Bennett (2009) yang melakukan wawancara mendalam kepada 12 perempuan di Orissa, India menemukan bahwa perempuan dari kasta tinggi (Brahmana, Ksatria, Waisya) memiliki keuntungan yang lebih saat terjadi bencana, dan berbanding terbalik dengan mereka yang berasal dari kasta rendah (Sudra, Ati Sudra).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mendalami bagaimana sebenarnya aktivitas dan peran perempuan Bali ketika menghadapi bencana. Melalui tulisan CH. De Cock-Wheatley (2012) yang berjudul *Wanita Bali* dalam buku *Bali Tempo Doeloe*, disebutkan bahwa mereka (perempuan Bali) dianggap sebagai barang dagangan bagi orang tua maupun suaminya, dan setelah menikah beban yang ditanggung perempuan akan semakin berat. Penggambaran ini diperkuat dengan tulisan Nakatani (1997) yang menyebutkan bahwa perempuan Bali memiliki tiga peran, yaitu peran dalam keluarga (istri dan ibu), peran pencari nafkah, dan peran sosial dalam kegiatan adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana konsepsi *triple roles* yang dimiliki oleh perempuan Bali – khususnya di Desa Besakih mampu membantu mereka untuk beradaptasi dengan bencana.

Penelitian ini hendak mengungkapkan bagaimana aktivitas dan potensi perempuan Bali berdasarkan konsep *triple roles*, khususnya dalam menghadapi erupsi Gunung Agung. Lokasi penelitian dipilih oleh penulis di Desa Besakih Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem yang menjadi KRB (Kawasan Rawan Bencana) III dengan radius 0-6 km dari Gunung Agung. Pelaksanaan riset dimulai pada bulan Agustus – Oktober 2019 dengan mekanisme *live-in* di salah satu rumah penduduk lokal supaya menemukan *setting* natural dalam riset kualitatif. Dengan meminjam kerangka teori George Hebert Mead (1934) tentang ‘diri’ (*self*) serta Teori peran (*roles*

theory) milik Blumer (1969), hasil penelitian diarahkan pada bagaimana perempuan Bali memainkan peran mereka dalam keluarga dan struktur sosial, terutama kesiapan mereka dalam menghadapi bencana.

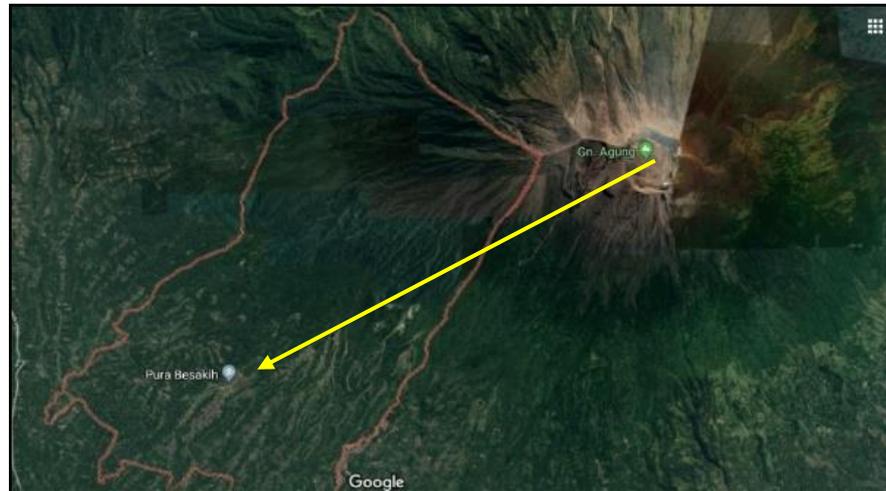
METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan gambaran utuh dan mendalam tentang bagaimana kondisi perempuan Bali dalam keseharian dan ketika menghadapi bencana, maka peneliti memilih menggunakan metode etnografi. Marvasti (2004) menekankan ada tiga dimensi dalam riset etnografi, yaitu keterlibatan dan partisipasi dalam topik yang dipelajari, perhatian terhadap konteks sosial pengumpulan data, dan kepekaan terhadap bagaimana subjek peneliti direpresentasikan dalam teks penelitian. Metode etnografi dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran detail (*thick description*) tentang bagaimana kehidupan keseharian perempuan Desa Besakih dalam konsep *triple roles* (domestik/keluarga, pekerjaan, dan religi/adat) dan bagaimana mereka menghadapi risiko bencana letusan Gunung Agung.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Besakih Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali. Lokasi ini dipilih karena Desa Besakih masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III, yaitu kawasan yang berjarak 0-6 km dari lokasi bencana, yaitu Gunung Agung. Dalam riset etnografi, untuk mendapatkan *setting* natural ketika melakukan pengamatan, peneliti menggunakan teknik *live-in* dengan warga lokal agar terbentuk kedekatan yang alami antara peneliti dengan informan. Peneliti tinggal di salah satu rumah informan selama 2 bulan secara intermiten, sejak Agustus hingga September 2019 dan melakukan pendekatan dengan warga lokal dengan berbagai cara. Strategi *live-in* ini efektif untuk mengamati perilaku keseharian penduduk lokal yang selanjutnya dituliskan ke dalam catatan etnografis. Meskipun dilakukan secara intermiten, namun informasi yang diberikan oleh informan sangat komprehensif. Informan juga tidak segan untuk dihubungi melalui WhatsApp atau telepon jika peneliti merasa membutuhkan informasi tambahan. Sedangkan teknik pemilihan informan yang digunakan oleh penulis yaitu *simple random sampling*. Teknik ini lazim digunakan oleh etnografer agar aktivitas keseharian informan tidak terganggu karena kehadiran peneliti ke dalam lingkungan mereka.

Untuk menjaga kestabilan proses pengumpulan data serta menjaga agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti memegang teguh etika penelitian. Misalnya, sebelum informan terlibat dalam proyek penelitian, peneliti memberikan lembar persetujuan – *consent letter*, yang selanjutnya ditandatangani oleh informan. Tujuan dari *consent letter* adalah menjaga kerahasiaan dan obyektivitas data penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Bali yang terletak pada zona KRB III, yang mana dianggap paling rawan dan paling terdampak akibat letusan Gunung Agung. Ketertarikan peneliti dengan Desa Besakih tidak hanya karena masuk dalam zona bahaya, namun juga keberadaan Pura Besakih yang bagi warga lokal memiliki keterikatan dengan Gunung Agung.



Gambar 1. Lokasi Penelitian Desa Besakih, Kab. Karangasem, Bali

Menurut Creswell (2012), riset etnografi merupakan salah satu strategi penelitian yang penelitiannya melakukan penyelidikan atas kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama ketika pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Dalam hal ini, seorang etnografer terlibat langsung dalam kehidupan keseharian sebagai bentuk pengamatan dan pengambilan data di lapangan. Salah satu tugas penting dalam riset etnografi adalah melakukan pengumpulan dan pencarian data. Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Ada lima informan perempuan, satu orang pemuka agama (*pedanda*), Kepala Desa Besakih, dan penduduk lokal yang tinggal di Desa Besakih sebagai responden penelitian. Penulis memutuskan untuk tinggal (*live-in*) di salah satu rumah penduduk lokal supaya memudahkan observasi tentang keseharian mereka. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara secara intermiten sebagai landasan validasi data observasi. Teknik pengumpulan data terakhir, peneliti menggunakan literatur (penelitian) terdahulu sebagai kerangka historis pada tahapan analisis data.

Berhubung esensi penelitian etnografi tidak hanya mengambil simpulan dari aktivitas budaya masyarakat tertentu, namun juga mengambil hikmah dan pelajaran sosial dari kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, tahapan paling menentukan dari riset etnografi adalah 'membuat data bercerita' (Kleden-Probonegoro, 2012). Merujuk tulisan Paul Benson (1993), etnografi baru

dimulai saat peneliti menulis laporannya, baik dalam bentuk laporan ilmiah maupun artikel. Pada tahapan menulis inilah data yang didapatkan melalui pengamatan di lapangan harus dapat bercerita, baik secara epistemologis maupun praksis. Sehingga tahapan penting dari riset etnografi selain pengumpulan data, yaitu penulisan laporan secara etnografis.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Perempuan cenderung memiliki akses yang kurang terkait kesiapsiagaan, mitigasi, dan rehabilitasi dalam situasi bencana (Aboobacker, 2011). Kondisi tersebut disebabkan karena akses informasi dan mobilitas perempuan dan anak-anak lebih terbatas, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan terhadap bencana. Kerentanan adalah suatu konsep yang sulit untuk dipahami, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan (Enarson, 2009). Belum lagi suguhan fakta bahwa angka harapan hidup perempuan akibat bencana secara kuantitatif lebih rendah daripada laki-laki cenderung menjadi temuan tetap. Beberapa di antaranya adalah temuan Neuyer dan Plumper (2007) melalui meta-analisis terhadap 4.605 kasus bencana di 141 negara sejak tahun 1981-2002 dan Fothergill (1998) melalui *review* terhadap 100 studi tentang bencana yang menyimpulkan bahwa memang lebih banyak perempuan yang menjadi korban bencana, khususnya perempuan di negara-negara berkembang (Juran, 2012). Sayangnya, pembacaan terhadap data ini selalu berangkat dari pemahaman yang dikotomis dan bias gender. Misalnya saja anggapan bahwa tingginya angka mortalitas perempuan akibat bencana salah satunya disebabkan oleh perbedaan biologis, anatomis, dan fisiologis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kemampuan fisik dan massa otot yang lebih besar daripada perempuan. Hal ini membuat mereka dipercaya lebih sanggup bertahan dalam situasi bencana dan memiliki mekanisme penyelamatan diri yang lebih baik (dapat berlari lebih cepat, dapat memanjat ke tempat yang lebih tinggi, bertahan dari arus air, berenang, dan sebagainya).

Ariyabandu dan Wickramasinghe (2003, dalam Ginige, Amaratunga, & Haigh, 2008) mengatakan bahwa kerentanan merupakan kondisi yang memengaruhi kemampuan negara, komunitas, dan individu untuk mencegah, mengurangi, mempersiapkan, dan merespons bahaya. Kerentanan sendiri memiliki empat dimensi yaitu (Ginige, Amaratunga, & Haigh, 2008):

- 1) Kerentanan fisik mengacu pada kerentanan lingkungan rawan bencana dan digambarkan sebagai “eksposur”. Contohnya seperti kedekatan jarak antara masyarakat dan properti dengan faktor pemicu bencana, konstruksi bangunan yang tidak tepat, serta degradasi lingkungan;
- 2) Faktor kerentanan sosial mencakup tingkat literasi dan pendidikan, infrastruktur kesehatan, keberadaan perdamaian dan keamanan, akses terhadap hak asasi manusia,

sistem pemerintahan yang baik, keadilan sosial, nilai-nilai tradisional, adat istiadat, serta keyakinan ideologis dan sistem organisasi kolektif secara keseluruhan;

- 3) Kerentanan ekonomi biasanya dialami oleh masyarakat yang termasuk dalam kelas atau kasta yang lebih rendah, etnis minoritas, usia yang sangat muda dan tua, yang kurang beruntung, dan seringkali perempuan yang bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan dasar;
- 4) Kerentanan lingkungan mengacu pada tingkat degradasi sumber daya alam.

Kerentanan perempuan dapat berasal dari semua keempat faktor di atas. Hastuti (2016) menjelaskan bahwa perempuan memiliki beberapa keterbatasan saat bencana terjadi seperti kurangnya akses terhadap sumberdaya seperti jaringan sosial, transportasi, informasi, keterampilan, kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, tempat tinggal dan pekerjaan. Kondisi ini diperparah dengan perbedaan secara fisik pada perempuan dan laki-laki (Juran, 2012). Banyak perempuan tidak memiliki kekuatan untuk lari cepat, memanjat pohon, dan berpegangan pada suatu benda dalam jangka waktu lama, ditambah lagi dengan kebanyakan perempuan yang beratnya lebih ringan di banding laki-laki sehingga perempuan lebih mudah untuk terbawa arus (Juran, 2012).

Faktor sosial lain yang layak menjadi perhatian penting adalah absennya perempuan dalam upaya mitigasi bencana sebagai eksekutif dari konstruk patriarkis yang dominan dalam masyarakat—upaya pengebakan dan pemerataan perempuan dalam ruang-ruang dan peran domestik. Konsep “ibu” dan pemujaan terhadap peran sentral ibu bagi ketahanan keluarga menjadi warisan Orde Baru yang tetap meninggalkan residu. Suryakusuma (2011) menyebut ini dalam terminologi ibuisme negara. Baginya, “Ibuisme” negara merupakan *Weltanschauung* (pandangan dunia), yang memangkas identitas eksistensial perempuan sebagai manusia. Darinya perempuan dibonsai, dipangkas, dikerdilkan, direduksi, pada arena domestik—sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendidik dan penanggung-jawab terhadap anak, dan penyokong negara.

Tidak hanya itu, strategi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas juga belum responsif gender. Menilik dari penelitian yang dilakukan oleh Haryono, Koesbardiati, dan Kinasih (2012) didapati bahwa perempuan memainkan peran penting di saat bencana, karena selain tetap menjalankan tugas dan fungsinya *care giver* dalam keluarga, mereka juga sering kali berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, tulang punggung keluarga, terutama ketika ia harus menjadi orang tua tunggal karena suami kehilangan pekerjaan. Tanaman padi hanyut dan ikan di tambak banyak yang hilang, maka suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Tidak jarang perempuan juga terlibat kegiatan sosial seperti membantu di dapur umum dan pos

kesehatan. Dalam keadaan bencana, peran dan serta beban perempuan justru bertambah. Perempuan bukan saja sebagai menjadi objek yang harus dilindungi, tetapi juga menjadi subyek berperan aktif sebagai *agent of change*. gender, aktor, alur komunikasi pra-bencana.

Domestikasi atas perempuan dalam konteks tersebut melanggengkan peran perempuan sebagai *family caretaker* sehingga ketika bencana datang mereka tidak hanya berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri namun juga menyelamatkan anak dan orang tua mereka. Selain itu, perempuan juga jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas publik. Literasi tentang upaya mitigasi bencana juga belum banyak menyentuh kaum perempuan sehingga mereka tidak memiliki pandangan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana atau bahkan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri saat bencana berlangsung.

Dalam situasi pasca bencana (*post-disaster*) perempuan juga masih harus menderita karena kurangnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi mereka, diantaranya rentan terkena infeksi dan mengalami masalah terkait menstruasi sebagai akibat dari lingkungan pengungsian yang kurang bersih dan tidak sehat. Ditambah lagi minimnya persediaan kebutuhan perempuan, ketersediaan air bersih, sanitasi yang buruk, dan juga ramainya situasi *shelter* atau tempat pengungsian yang membuat tidak nyaman, terlebih bagi mereka yang sedang hamil atau memiliki bayi. Pendekatan yang lebih sensitif terhadap gender diperlukan dalam menggagas model mitigasi bencana yang lebih ramah gender, salah satunya dengan strategi pengarusutamaan gender, pemahaman yang lebih setara terhadap dampak bencana dan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta pelibatan aktif perempuan dalam kerangka kerja manajemen kebencanaan.

PEMBAHASAN

Secara historis, bencana dikenal sebagai tindakan Tuhan, atau peristiwa di luar kendali manusia, yang membawa gangguan besar pada masyarakat (McEntire, 2001). Lembaga internasional seperti UN/ISDR mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap kestabilan masyarakat, yang berdampak pada kerugian manusia, material, ekonomi, dan lingkungan, melebihi kapasitas sebuah komunitas atau masyarakat yang terdampak (Kelman dan Pooley, 2004). Pendapat lainnya mengartikan bencana berdasarkan faktor spasial yang terbagi ke dalam bencana kecil, lokal, dan regional (Kumar, 2000). Intinya, bencana selalu membawa dampak, baik secara fisik maupun psikis bagi masyarakat yang tinggal di area terdampak. Oleh karena itu, pada tahun 2005 di Kobe Jepang lahir kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang dikenal dengan *Hyogo Framework* atau Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015. Selanjutnya, kerangka

ini mengalami pembaharuan dengan lahirnya Kerangka Aksi Sendai (*Sendai Framework*) 2015-2030 dimana prioritasnya diarahkan pada (1) memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkat masyarakat untuk menekan angka kerentanan, dan (2) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif. Berdasarkan tujuan dari Kerangka Aksi Sendai ini, penulis tertarik untuk melihat sejauhmana perempuan dilibatkan dalam aktivitas pendidikan dan pengurangan risiko bencana.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran dan kapasitas perempuan Bali dalam kerangka *triple roles*, khususnya di Desa Besakih ketika menghadapi erupsi Gunung Agung di tahun 2017 dan 2018. Namun, sebelum membahas lebih mendalam tentang fokus tersebut, penulis akan menjelaskan kondisi yang berhubungan dengan kerentanan perempuan dan persepsi masyarakat Desa Besakih Kecamatan Rendang ketika mengalami bencana. Observasi dan wawancara yang dilakukan penulis secara intermiten menghasilkan beberapa poin dalam sub-bab pembahasan, antara lain: (1) masyarakat Desa Besakih merasa 'istimewa' – *prajurit penjaga Pura Ibu (Besakih) dan Gunung Agung*, sehingga ketika terjadi erupsi, masyarakat perlu melakukan refleksi ke dalam diri masing-masing mungkin ada kesalahan dalam perilaku keseharian yang membuat *Hyang Widhi* marah; (2) masih kurangnya konsep *triple roles* (Nakatani, 1997) perempuan Desa Besakih dalam kehidupan keseharian mereka; (3) potensi mitigasi mandiri (*self mitigation*) bagi perempuan di Desa Besakih dan sekitarnya ketika terjadi bencana; (4) peran aktor lokal dalam pengurangan risiko bencana di Bali.

Secara geografis, Gunung Agung merupakan salah satu gunung berapi *semi-aktif* yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. Dengan ketinggian mencapai 10.000 kaki, masyarakat Bali mempercayai bahwa Gunung Agung adalah rumah para Dewa Bali, seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa serta Dewa leluhur yang dipuja di setiap pura dan rumah di Bali (Matthews, 2012). Sejarah mencatat bahwa Gunung Agung pertama kali meletus pada tahun 1808 dilanjutkan di tahun 1821, 1843, dan yang terdahsyat yaitu pada tahun 1963 hingga pada akhirnya gunung ini tertidur selama kurang lebih lima dasawarsa, dan memilih meletus lagi pada tahun 2017 (Arif, 2018). Berdasarkan hasil penelusuran arsip terkait letusan Gunung Agung, tercatat kurang lebih 1700 orang meninggal dan 75 ribu orang dievakuasi saat letusan tahun 1963 yang disebabkan terkena awan panas dan lahar dingin, dengan dominasi korban adalah perempuan dan anak-anak (Zen & Hadikusumo, 1964). Masih dari arsip yang sama, banyaknya korban saat erupsi 1963, disebutkan salah satunya karena kurangnya pengetahuan warga tentang erupsi vulkanis. Sebagian besar dari mereka tidak pernah memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan erupsi

Gunung Agung. Hal ini dapat dimaklumi karena erupsi terakhir yang tercatat sekitar 120 tahun lalu, yaitu tahun 1843. Selain kondisi tersebut, saat erupsi 1963, masyarakat Bali sedang melaksanakan upacara *Eka Dasa Rudra*, dimana kegiatan ini terpusat di Pura Besakih, yang berjarak sekitar 5 km dari puncak Gunung Agung.



Gambar 2 Gunung Agung Erupsi tahun 2017

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Kondisi Gunung Agung ternyata tidak benar-benar tertidur. Pada bulan September 2017, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat adanya peningkatan status dari Siaga menjadi Awak Level IV. Tidak berselang lama dari penetapan status tersebut, gunung ini erupsi. Masyarakat panik, sebagian dari mereka merasa tidak terinformasikan dengan jelas terkait status Gunung Agung dan tindakan apa yang harus diambil ketika menghadapi erupsi. Alhasil sebagian warga Desa Besakih yang berstatus Kawasan Rawan Bencana (KRB) III mengungsi ke lokasi yang dirasa aman, tanpa ada petunjuk yang jelas dari pihak terkait. Istilah KRB III merujuk pada kondisi sebuah kawasan yang berpotensi tinggi terkena dampak awan panas, aliran lava, aliran lahar panas/dingin, loncatan batu (pijar), dan/atau gas beracun.



Gambar 3 Api yang membakar hutan lereng Gunung Agung
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Dalam setiap kejadian bencana, terdapat dua faktor utama yang akan dilihat, yaitu kerentanan dan kapasitas masyarakat dan sumber daya yang ada di sekitar lokasi bencana. McEntire (2001) mengategorikan kerentanan ke dalam beberapa variabel, antara lain kerentanan fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi. Ia juga menjelaskan bahwa kerentanan bertindak sebagai komponen dependen sedangkan agen pemicu berdiri sebagai komponen independen dari suatu bencana. Komponen dependen ini ditentukan oleh tingkat risiko, kerentanan, resistensi, dan ketahanan. Oleh karena itu, kerentanan harus dikelola untuk mengurangi bencana. McEntire (2001) menunjukkan bahwa manajemen kerentanan merupakan proses di mana keputusan dan kegiatan dirancang dan diimplementasikan dengan sengaja untuk memperhitungkan dan menghilangkan risiko bencana sekecil mungkin.

Skala kerentanan perempuan dalam situasi bencana semakin hari makin meningkat. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding pria dewasa. Hal ini disebabkan karena naluri perempuan yang ingin melindungi keluarga dan anak-anaknya, sehingga seringkali membuat mereka mengabaikan keselamatan diri sendiri. Fakta ini diperkuat dengan hasil seminar nasional *Pendidikan Waspada Bencana Alam bagi Perempuan dan Anak* menyimpulkan setidaknya ada tiga alasan mengapa perempuan rentan menjadi korban bencana alam. Pertama, adanya konstruksi nilai dalam masyarakat yang mengharapkan perempuan untuk lebih dahulu menyelamatkan anggota keluarganya. Kedua, perempuan sering tidak dapat hadir dalam latihan penyelamatan diri dari kondisi bencana alam. Hal ini terjadi karena konstruksi nilai budaya yang

memosisikan perempuan sebaiknya fokus pada urusan domestik (rumah) daripada mengikuti kegiatan di luar rumah (pelatihan). Ketiga, ketidakhadiran perempuan dalam pendidikan bencana membuat pengetahuan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim. Keempat, mudarnya faktor pengetahuan lokal dalam masyarakat tentang pengenalan gejala awal bencana alam.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan perempuan yang terpilih terkait bagaimana mereka menghadapi bencana, salah satunya yaitu ketika Gunung Agung erupsi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun perempuan Bali memiliki tugas yang banyak antara domestik, bekerja, dan terlibat dalam aktivitas ritual namun mereka masih memiliki 'kekuatan' untuk bertahan dalam situasi krisis. Dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki, perempuan di Desa Besakih berpotensi menjadi *agent of change* pengurangan risiko bencana di daerah mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, salah satunya berinisial NA mengungkapkan bahwa ketika Gunung Agung erupsi di bulan September 2017, ia dan keluarganya telah siap mengungsi dengan membawa barang (dokumen penting) yang sudah disiapkan sebelumnya.

"Kita kan udah dihimbau sama pemerintah, sebelumnya dihimbau menjauhi 6 kilometer dari kawah. Kan udah dihimbau, sebelumnya, jauh-jauh hari udah dihimbau disuruh ngungsi, berarti kita ada persiapan. Waktu pertama kalinya ada gempa, menjelang erupsi itu, baru pemerintah yang turun langsung kan, tim sarnas itu langsung bawa mobil-mobil besar itu, langsung dihimbau masyarakat ngga ada yang boleh diem di sini, gitu." (Agustus 2019)

Hal ini terjadi karena NA mengaku mendapat himbuan dari pemerintah dan pengalaman orang tua NA yang menjadi saksi ketika Gunung Agung erupsi tahun 1963. Kolaborasi informasi dari pihak terkait, seperti BPBD dan relawan, serta pengalaman masa lalu menjadi modal bagi perempuan melakukan mitigasi mandiri ketika menghadapi bencana. Berbeda dengan NA, informan WD mengatakan bahwa ketika pemerintah menghimbau warga untuk mengungsi, WD dan keluarganya tidak melakukan itu. Salah satu alasannya adalah *meme* (ibu) informan WD melihat bahwa tanaman (hutan) di sekitar gunung masih hijau. Menurutnya, kalau Gunung Agung erupsi, tanaman di sekitarnya akan berguguran dan kering. Namun, ketika Gunung Agung benar-benar erupsi, keluarga WD tidak sempat membawa perlengkapan atau barang berharga yang semestinya dibawa ketika mengungsi. Bahkan, ia mengaku meninggalkan barang dagangannya begitu saja karena panik untuk segera menuju lokasi pengungsian.

"Orang itu kan pas gempa-gempa itu disuruh ngosongin desanya, langsung dah, masih jualan. ... nginep satu malam terus besoknya balik lagi ke sini, kembali dah jualan kan, maunya jualan, udah bikin begini terus 22 itu disuruh ngosongin kan,

biar kosong desanya, ngga jadi jualannya. ... Ke Ayung itu dah sampe 4 bulan. Iya bawa motor dah itu sama keluarga, orang ndak punya mobil. Itudah bawa baju, cuma peralatan dikit ndak banyak, kan orang ini mendadak.” (Agustus 2019)

Kepanikan yang dialami informan WD ternyata juga dialami keluarga lain yang tinggal di Desa Besakih. Mereka mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa, *banjar*, dan BPBD berbeda, sehingga mobilisasi warga hanya berdasarkan intuisi saja. Namun, ditengah kepanikan yang melanda, para perempuan Desa Besakih masih optimis bahwa letusan Gunung Agung tidak akan melukai mereka. Para perempuan Desa Besakih meyakini bahwa dengan tidak melewati sembahyang, *ngaturaken canang*, dan *mebanten*, mereka akan dilindungi para Dewa yang berdiam di Pura Besakih. Pernyataan ini diperkuat oleh Pak Nengah – *pedanda* – yang tinggal di Desa Besakih, yang mengatakan bahwa Gunung Agung itu tempat para Dewa bersemayam, tidak akan mungkin Dewa-Dewa itu akan menyakiti masyarakat yang selalu menjaga dan sembahyang di sana. Ia menegaskan dalam wawancara bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan Pura Besakih adalah *guardian of deities*, maka tidak lama setelah letusan mereda, mereka kembali ke rumah masing-masing, bahkan ada juga yang langsung membuka warung usaha mereka. Artinya, erupsi Gunung Agung tahun 2017 dan 2018 tidak selamanya menyisakan duka dan trauma, sebagian dari mereka merasa bahwa berkah yang diberikan pasca erupsi juga membawa manfaat untuk warga.

Kejadian bencana tentunya akan membawa dampak bagi seluruh makhluk hidup, namun yang sering terlupakan adalah dampak dan beban yang mungkin diterima oleh laki-laki dan perempuan dapat berbeda (Murtakhamah, 2013). Selama bencana alam terjadi, perempuan menghadapi tantangan dan dampak yang berbeda dengan laki-laki. Salah satu penyebabnya, adanya perbedaan peran yang mereka jalani, seperti kapasitas dalam kehidupan privat dan publik, kebutuhan, dan tingkat kerentanan. Terlebih, dalam struktur sosial secara umum, perempuan semakin rentan dan terpinggirkan secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Alagan & Aladuwaka, 2015; Ginige, Amaratunga, Haigh, 2009; Enarson, 2002). Dikutip juga dari laman The Conversation (2019), perempuan menghadapi risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding pria dewasa. Korban perempuan tersebut umumnya terperangkap dalam ranah domestik ketika bencana datang sehingga kesempatan menyelamatkan dirinya lebih kecil. Sebagai contoh, ketika bencana tsunami melanda Asia tercatat jumlah korban terbanyak yaitu perempuan, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Jikalau perempuan tersebut selamat, mereka masih mengalami kekerasan domestik hingga pelecehan seksual (Twigg, 2004; Chew & Ramdas, 2005). Lalu bagaimana dengan kondisi perempuan yang tinggal di Desa Besakih ketika erupsi dan pasca erupsi Gunung Agung? Persamaan gender dan isu-isu perempuan telah menjadi

salah satu topik utama dalam wacana publik Indonesia (Suryakusuma 1996). Di Bali, seperti di tempat lain di Indonesia, budaya patriarkal tradisional yang memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas bawah dibandingkan dengan laki-laki dan menugaskan mereka peran domestik daripada peran publik selalu sangat kuat tetapi tidak berjalan sama sekali tanpa tantangan (Putra, 2011).

Perempuan, dalam sistem sosial di Bali masih terikat sistem kekerabatan patrilineal. Seperti pada umumnya daerah yang menganut budaya patriarki, penulis mendapati adanya kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tulisan CH. De Cock-Wheatley (2012) dijelaskan bahwa perempuan dianggap sebagai barang dagangan bagi orang tuanya, maupun suaminya, dan setelah menikah, beban perempuan akan semakin banyak. Apabila ia (perempuan sebagai seorang istri), gagal dalam memenuhi takdirnya sebagai seorang ibu – atau hanya ‘mampu’ melahirkan anak perempuan, maka posisinya akan makin tersudutkan. Ia akan kehilangan haknya dan dianggap sebagai investasi yang gagal. Tulisan lain terkait perempuan Bali, seperti Nakatani (1997, 1999) menggambarkan tentang kehidupan perempuan penenun di sebuah desa di Bali Timur, dimana sedikit pihak laki-laki lebih memilih pekerjaan di bidang pariwisata atau kantor-kantor pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih harus memprioritaskan kegiatan ritual dan yang berhubungan dengan rumah tangga sebelum pergi bekerja untuk menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendanai tanggung jawab tradisional ini. Tetapi ‘otonomi relatif’ perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak menjamin perempuan memiliki kesetaraan dalam bidang tindakan politik dan ritual’ (Miller dan Branson 1989). Terlebih masih diakuinya sistem kasta yang memicu terjadinya konflik sosial (Wirata, 2007), dapat dikatakan bahwa konflik sosial sebenarnya adalah konflik kasta.

Nakatani (1997) dalam tulisan yang berjudul *Private or Public? Defining Female Roles in the Balinese Ritual Domain*, menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Bali memiliki tiga peran utama (*triple roles*). Peran pertama yaitu di keluarga – sebagai sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami, anak, orangtua maupun mertua. Peran kedua yaitu peran ekonomi, penunjang kesejahteraan ekonomi keluarga. Tuntutan ekonomi membuat setiap keluarga khususnya di Bali, harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja. Peran ketiga adalah peran adat keagamaan dengan mengokohkan penerapan budaya melalui kegiatan kesehariannya. Ketiga peran tersebut tertanam dalam laku keseharian, sehingga tak jarang disebut bahwa perempuan Bali dikatakan mengalami ketidakadilan gender.

Perempuan Hindu Bali tidak terlatih untuk pengambilan keputusan atau terlibat dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Unit pengambilan keputusan terkecil di tingkat desa adat di Bali berada pada tingkat *banjar* (Rhoads, 2012). *Banjar* secara tradisional berdasar pada hukum

adat dan bertanggungjawab pada proses ritual, namun perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya (bersuara) di banjar di Bali (Warren, 2007 dalam Rhoads, 2012). Terlebih, mengutip pendapat Kindon (1998) yang dikutip Nitish Jha (2004) menjelaskan bahwa laki-laki Bali sangat jarang mengkonsultasikan apa yang diputuskan di *sangkep* banjar dengan istrinya, meskipun terkadang keputusan tersebut berdampak pada pekerjaan adat yang harus dikerjakan oleh perempuan.

Masih tentang *triple roles* perempuan Bali yang berkaitan dengan kegiatan ritual (adat/keagamaan), hampir 75% dari waktu yang dimiliki perempuan Bali 'hanya' untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ritual di *banjar*, sehingga pernyataan *rituals as a work* bagi perempuan Bali tidak terbantahkan. Memang, dalam pelaksanaan ritual, perempuan banyak memiliki waktu untuk Bersama, sehingga interaksi tersebut merupakan modal untuk pemberdayaan, terutama menghadapi bencana alam maupun non-alam. Kebersamaan dalam pelaksanaan ritual dapat dijadikan sebagai medium interaksi dan internalisasi terhadap kepercayaan dan keyakinan akan ritual yang dilaksanakan, yang tentu saja bermanfaat bagi kesiapan diri menghadapi bencana.



Gambar 4. Perempuan pedagang makanan kecil di Pura Besakih
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Sebagaimana hasil observasi penulis selama tinggal di Desa Besakih menemukan beberapa fakta menarik terkait kesiapan para perempuan ketika menghadapi bencana. Salah satu informan peneliti berinisial AC, selaku pihak BPBD Bali mengatakan sebagai berikut:

“Nah, karena untuk diri, penguatan diri atau penyelamatan diri, kita ada semacam trik untuk penyelamatan diri ya bawa kaca mata, pakai masker, jaket, lengan panjang,

sepatu itu kan sudah kita, helm, kami menyebutnya family kit. ... kita menyarankan bagi yang di luar KRB itu harus menyiapkan semacam ransel atau tas, tas siaga namanya, tas siaga itu isinya senter, obat-obatan yang memang rutinitas dia bawa, air mineral, biskuit, itu yang menjadi perlengkapan untuk tas siaga.” (Agustus & Oktober, 2019)

Dari hasil wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwa belum tampak adanya keterlibatan perempuan dalam aktivitas pengurangan risiko bencana, hal ini cukup masuk akal karena secara adat posisi perempuan di Bali “di bawah” laki-laki, sehingga peran mereka tertutupi oleh peran laki-laki di keluarganya yang lebih dominan. Namun, ketika penulis mencoba bertanya lebih detail kepada informan AC tentang bagaimana peran perempuan ketika erupsi Gunung Agung, ia menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dapat dilihat di pengungsian, membantu kegiatan domestik seperti memasak, membuat sesaji (*mejejaitan*), dan beberapa dari mereka ada yang tetap berjualan di pasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Menurut AC, kegigihan perempuan Bali, dalam hal ini adalah perempuan-perempuan Desa Besakih menunjukkan bahwa mereka dapat berdaya sendiri menyiapkan diri jika sewaktu-waktu bencana tiba. Sebagai contoh, salah satu informan menceritakan bahwa ia sempat kembali ke rumahnya di Besakih ketika Gunung Agung aktif mengeluarkan abu pekat hanya untuk mengambil beberapa surat penting, seperti buku nikah, kartu keluarga (KK), dan beberapa dokumen resmi lain. Saat kami tanya, mengapa bukan suaminya, ia menjawab bahwa sang suami sudah sibuk dengan aktivitas relawan dan kegiatan adat.

Tidak hanya itu, AC juga menyebutkan ada kelompok sosial yang bernama *Pasebaya Agung* (Pasemetonan Jagabaya Gunung Agung). Kelompok ini terdiri dari istri para pemuka masyarakat dan pemuka adat di kawasan Gunung Agung. *Pasebaya Agung* merupakan perkumpulan yang menghubungkan masyarakat dengan BPBD dan pihak-pihak terkait, dengan tujuan menyebarluaskan dan klarifikasi informasi terkait status Gunung Agung. Kelompok ini memiliki akun grup *WhatsApp* untuk memudahkan berkoordinasi. Menariknya, perempuan-perempuan yang menjadi anggota dari *Pasebaya Agung* adalah para istri dari pemuka adat/pendeta yang sudah pasti menempati kasta tinggi atau disebut dengan *triwangsa* (Brahmana, Ksatria, dan Waisya) sehingga di satu sisi mereka tidak terlalu merasakan pemarjinalan sebagaimana perempuan yang berada di kasta *Sudra/Jaba*. Penulis mendapati bagaimana perempuan yang di kelompok *jaba* tetap mendapatkan perlakuan berbeda dengan perempuan berkasta lainnya. Di sisi lain, meskipun perempuan berkasta memiliki ruang, seperti misalnya berpendapat dalam *Pasebaya Agung* itu tapi mereka tidak dapat mengambil keputusan terkait persiapan menghadapi bencana. Peran itu masih dilakukan oleh laki-laki. Lalu bagaimana perempuan Desa Besakih menghadapi bencana? Masih mengutip dari wawancara dengan informan AC dikatakan bahwa perempuan

Bali lebih tegar dalam melewati kondisi krisis, seperti misalnya bencana letusan Gunung Agung kemarin. Ia menjelaskan bagaimana perempuan-perempuan percaya pada *Hyang Widhi* (Tuhan) akan melindungi mereka selama bencana. Hal ini dikarenakan, dalam kesehariannya, perempuan sudah mengabdikan diri kepada suami, keluarga, dan rutinitas menyajikan sesaji (*yadnya*) bagi Dewa. Beberapa perempuan yang ditemui penulis selama tinggal di Desa Besakih, mengaku jika mereka merasa lebih berani dan siap ketika menghadapi bencana yang mungkin (akan) menimpa mereka.

“Apalagi perempuan Bali itu, sudah melekat sekali yang namanya sajen itu untuk yang kuasa. Dia percaya dirinya bahwa tidak bakalan saya akan kena musibah, itu dia kuat. Kalau sembahyang kan rutin dia, kayak sesajen, dia merasa kalo abis sembayang, maturin sesajen, apa ucap-ucap, dia merasa agak udah saya berani gitu. Kepercayaan diri. (Oktober 2019)

Optimisme perempuan Desa Besakih dalam menghadapi bencana mendorong untuk semakin mandiri, seperti aktif mencari informasi kebencanaan, bergabung dalam forum-forum mitigasi bencana yang ada di *facebook*, dan terkadang memberanikan diri untuk bertanya kepada pemuka agama (*pedanda*) terkait Langkah apa yang harus dilakukan ketika bencana. Kemandirian ini menunjukkan bahwa potensi perempuan Bali sebagai *agent of change* dalam pengurangan risiko bencana sangat besar. Dengan memberikan ruang bagi mereka untuk bersuara dan mulai mendengarkan cerita mereka juga nampaknya akan semakin menguatkan posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat. Tanpa meninggalkan peran utama sebagai istri dan ibu, perempuan Desa Besakih dapat berdaya secara ekonomi dan sosial.



Gambar 5. Informan sedang *mejejaitan* (membuat sesaji) (kiri);
Informan berpose di depan warung miliknya (kanan)

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Mengutip pendapat Ariati (tidak ada tahun) dijelaskan bahwa dalam kepercayaan Hindu, aspek keTuhanan wanita selalu diakui. Namun, dalam struktur sosial masyarakat Bali, wanita selalu

dianggap sebagai orang yang melakukan sihir dan menyebabkan keburukan dapat menimpa kehidupan sebuah desa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam mitologi Bali dikenal adanya Dewi Durga dan rekan manusianya, Rangda. Rangda direpresentasikan ke dalam sosok wanita yang kuat, sangat merusak, tetapi apabila kita memperlakukannya dengan baik (dengan memberikan sesaji yang cukup), Rangda akan menjadi Dewi pelindung desa. Dari penjelasan tersebut, Ariati menyimpulkan bahwa lelaki Bali melihat perempuan sebagai cerminan kekuatan Rangda yang berbahaya dan karenanya, domestifikasi perempuan Bali dianggap sebagai upaya membatasi kekuatan perempuan melebihi laki-laki.

Menyitir pendapat Creese (2004) dan Parker (2003), menjelaskan bahwa meskipun perempuan Bali melakukan sebagian besar atau hampir semua tugas ritual, namun partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan harus terus dibatasi, kondisi inilah yang menggambarkan dominasi budaya patriarki dalam masyarakat Bali. Dalam konteks kebencanaan, posisi perempuan yang masih sering terpinggirkan membuat mereka sedikit kesulitan berdaya dalam menghadapi situasi bencana. Jika dihubungkan dengan aspek kebencanaan Gunung Agung, perempuan-perempuan di Desa Besakih mengakui bahwa *triple roles* (tiga peran utama) yang ditemukan oleh Nakatani (1997, 1999) adalah peran yang semestinya dan dapat membantu mereka lebih berdaya untuk mencari informasi tentang bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NA, ia mengaku tidak masalah setiap hari harus bangun pagi dan mencari nafkah untuk keluarga karena dengan begitu ada kegiatan yang dilakukan dan bertemu dengan sesama pedangang di sekitar Pura Besakih. Kondisi demikian akan dialami oleh perempuan yang sudah menikah, untuk perempuan *single* peran mereka hanya mencari nafkah dan terlibat dalam proses ritual (adat).

“Pernah, dari ya kita kan ada BBM, di HP kan kita tinggal download, ada informasi Karangasem. Kalo kita merasa gimana, kita cari di sana, dibanding kita denger informasi yang ngga-ngga, nantikan takut kita. Iya dari website.” (Agustus, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa salah satu saluran informasi bagi perempuan-perempuan di Desa Besakih yaitu aplikasi pesan berjejaring, *Blackberry Messenger* (BBM). Sayangnya, aplikasi ini sudah ditutup di awal tahun 2019, sehingga mereka beralih menggunakan *WhatsApp* sebagai saluran komunikasi. Informan lain, yaitu SC yang kami wawancara di warungnya merasa lebih nyaman mencari informasi kebencanaan, khususnya Gunung Agung melalui *Google* atau media sosial (*facebook*). Menurutnya, kecepatan akses informasi serta bisa diakses melalui akun mereka sendiri memberikan keuntungan ketika mempersiapkan diri menghadapi situasi bahaya. Biasanya ia mengakses akun *facebook* dengan nama “Info Mitigasi Karangasem” untuk mengetahui informasi terkait Gunung Agung, sampai

pada apa saja yang harus disiapkan sebelum bencana menimpa. Lantas kami bertanya bagaimana dengan perempuan lainnya, yang tidak paham dengan teknologi, seperti informan WD misalnya. Dengan usianya yang sudah cukup tua, WD merasa kesulitan apabila harus menggunakan gawai pintar dan aplikasi media sosial, ia mengatakan lebih mengandalkan informasi dari warga desa lain terkait kesiapan menghadapi bencana.

“Gini aja temannya masih di sana, ndak papa teliti tenang pikirannya... dari Mukus tuh 3 kilo, ndak ada dah di sana. Orang dari Mukus ndak papa, jadi meme di sini aja dulu, gitu, kan jadi tenang pikirannya.” (Oktober, 2019)

Mengapa menyebut Temukus? Temukus adalah sebuah desa yang berjarak sekitar 3 km dari Gunung Agung. Orang-orang di Desa Besakih percaya apabila warga Desa Temukus belum turun, maka warga di Besakih merasa kondisi Gunung Agung masih aman. Informan SC menambahkan, ia aktif mencari informasi melalui *facebook* karena lebih percaya dengan beberapa foto yang diunggah oleh warganet terkait kondisi Gunung Agung. Bahkan, ia sempat mengabarkan ke sesama pedagang perempuan di sekitar Pura Besakih untuk segera mengungsi karena ia membaca di laman *facebook* miliknya ada tiga orang pendaki Gunung Agung yang mengabarkan kawah gunung sudah hampir terisi penuh. Kecanggihan gawai juga dimanfaatkan oleh informan IA ketika diminta tolong keluarganya mencari informasi tentang Gunung Agung. Ia mengaku bahwa agar tidak tertinggal informasi maka ia membuat akun *facebook* dan mengikuti (*follow*) akun-akun informasi mitigasi Gunung Agung. Seperti yang dikutip dalam wawancara di bawah ini:

“Iya harus cari informasi sendiri, kalo nunggu aba-aba orang lain, ndak tau, kadang-kadang kan tidur, gitu kan ndak tau orang rumahnya jauh-jauh. orang semua kan liat-liat Facebook, oh gini gini gini, gitu. Kalo tante ndak, orang sibuk harus jualan, yaa ikut-ikutan aja.” (Oktober, 2018)

Meskipun belum ada riset ilmiah terkait tingkat literasi para perempuan di Desa Besakih ini, namun dari penuturan mereka selama wawancara menunjukkan bahwa untuk mencari informasi guna menyiapkan diri menghadapi bencana dapat mereka lakukan tanpa menunggu instruksi suami. Terlebih, seluruh informan yang ditemui di Desa Besakih, sebagian besar memiliki gawai pintar dan akun media sosial. Sehingga, dapat dikatakan pengetahuan terkait bencana, khususnya letusan Gunung Agung dapat dijangkau oleh mereka tidak hanya melalui suami, pemuka adat atau BPBD, namun juga melalui Internet (media sosial).

SIMPULAN

Perempuan pada umumnya tidak hanya rentan terhadap dampak dari kejadian bencana (*present*), tetapi juga harus mampu bertahan dari semua kondisi yang berubah pasca bencana menimpa

mereka (*future*). Oleh karena itu pelibatan aktif perempuan dalam aksi pengurangan risiko bencana dirasa menjadi fokus utama saat ini. Tingginya risiko kematian yang diterima oleh perempuan menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan kebencanaan sebaiknya dimulai dari keluarga. Perempuan Bali yang terikat sistem patrilineal dan *triple roles* seolah tidak memiliki ruang privat yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka tentang kebencanaan. Secara umum, nilai budaya yang umum adalah bahwa perempuan ditekankan oleh tuntutan peran terlalu banyak, dan mereka harus meninggalkan peran publik mereka, karena peran mereka yang sebenarnya dan paling penting adalah yang diarahkan pada keluarga dan kehidupan rumah tangga mereka. Hemat kami, peran domestik dan aktivitas keagamaan telah mengambil waktu, tenaga, dan pikiran dari perempuan Bali, sehingga mereka kadang mengaku kesulitan jika diminta untuk tanggap dan cepat bergerak ketika bencana terjadi.

Namun, dengan kehadiran teknologi komunikasi seperti *facebook*, *WhatsApp*, dan aplikasi lainnya, diharapkan dapat menjadi medium interaksi dan berbagi informasi tentang bencana. Sebagian besar wanita dalam penelitian ini mengaku bahwa bagaimana mereka kompeten dan mandiri dalam menyelesaikan beberapa tugas domestik, pekerjaan, ritual (adat), ditambah kegiatan selama masa krisis (bencana). Dilansir dari artikel oleh Nurtjahyo (2019), setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa perempuan rentan menjadi korban bencana alam. Pertama, perempuan hidup dalam konstruksi nilai yang mengharapkan mereka untuk lebih dahulu menyelamatkan anggota keluarga. Kedua, perempuan jarang mengikuti latihan tentang kebencanaan karena terhalang pekerjaan domestik. Ketiga, pengetahuan perempuan tentang kebencanaan, termasuk pencegahan dan penanggulangan, sangat minim. Terakhir, pengetahuan lokal tentang pengenalan gejala awal bencana alam telah memudar di tengah-tengah masyarakat dan berpengaruh pada penyebaran akses informasi yang rendah pada perempuan. Tidak ketinggalan, kerentanan tersebut pun sangat berkaitan dengan tingkat perekonomian keluarga, kondisi fisik, tempat tinggal (perkotaan atau perdesaan), dan latar belakang sosial-budaya (adat istiadat).

DAFTAR PUSTAKA

- Alagan, R., & Aladuwaka, S. (2011). Natural Disaster, Gender, and Challenges: Lessons from Asian Tsunami. In Democracies: Challenges to Societal Health. In *Democracies: Challenges to Societal Health*. Emerald Publishing Limited.
- Alam, K., & Rahman, M. H. (2014). Women in natural disasters: A case study from southern coastal region of Bangladesh. *International Journal of Disaster Risk Reduction*.
- Ariati, N. W. P. (n.d.). *Women's Roles in Balinese Society*.
- Arif, A. (2018, April 8). *Hidup-Mati di Negeri Cincin Api*. Retrieved from [kompas.com:https://tekno.kompas.com/read/2011/09/14/05272934/hidupmati.di.negeri.cincin.api](https://tekno.kompas.com/read/2011/09/14/05272934/hidupmati.di.negeri.cincin.api)

- Benson, P. (Introduction by E. M. B. (1993). *Anthropology and Literature*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism : perspective and method*. Berkeley: University of California Press.
- Chew, L., & Ramdas, K. N. (2005). Caught in the Storm: The Impact of Natural Disasters on Women. *The Global Fund for Women*.
- Creese, H. (2004). Reading the Bali Post: Women and Representation in Post-Suharto Bali. *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson.
- Enarson, E. (2002). *Gender Equality, Work, and Disaster Reduction: Making the Connections*.
- Fothergill, A. (1999). Women's Roles in a Disaster. *Applied Behavioral Science Review*.
- Ginige, K., Amaratunga, R., & Haigh, R. (2008). *Gender mainstreaming in disaster reduction: Why and how?* Manchester: University of Salford Manchester.
- Haryono, T. J. S., Koesbardiati, T., & Kinasih, S. E. (2012). Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan Pada Komunitas Survivor Di Wilayah Rawan Banjir. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*.
- Hastuti. (2016). Peran Perempuan Dalam Menghadapi Bencana di Indonesia. *Geomedia*.
- Jha, N. (2004). Gender and decision making in Balinese agriculture. *American Ethnologist*.
- Juran, L. (2012). The Gendered Nature of Disasters: Women Survivors in Post-Tsunami Tamil Nadu. *Indian Journal of Gender Studies*.
- Kelman, I., and P. (2004). *Disaster definitions*. Retrieved from <http://www.ilankelman.org/miscellany/DisasterDefinitions>
- Kleden-Probonegoro, N. (2012). Etnografi: Membuat Data Bercerita. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*.
- Krishnaraj, M. (1997). Gender Issues in Disaster Management: The Latur Earthquake. *Gender, Technology and Development*.
- Kumar, J. . (2000). Disaster management and social development. *International Journal of Sociology and Social Policy*.
- Marvasti, A. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. London: SAGE Publication, Inc.
- Mathews, A. (2012). *Letusan Gunung Agung*. In A. Vickers, *Bali Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- McEntire, D. . (2001). Triggering Agents, Vulnerabilities and Disaster Reduction: Towards a Holistic Paradigm. *Disaster Prevention and Management*.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society: From the standpoint of a social behaviorist*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mehta, M. (2007). *Gender Matters: Lessons for Disaster Risk Reduction in South Asia*.
- Miller, Don B., and J. B. (1989). Pollution in Paradise: Hinduism and the Subordination of Women in Bali. In *Dalam P. Alexander, Creating Indonesian Cultures*. Sydney: Oceania Publication, University Sydney.
- Murtakhamah, T. (2013). Pentingnya Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pengurangan Risiko Bencana. *WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Nakatani, A. (1997). Private of Public?: Defining Female Roles in the Balinese Ritual Domain. *Southeast Asian Studies*.
- Nakatani, A. (1999). Chapter 7. "Eating Threads": Brocades as Cash Crop for Weaving Mothers and

- Daughters in Bali* (R. Rubinstein & L. H. Connor, Eds.). University of Hawaii Press.
- Nakatani, A. (2003). Ritual As 'Work': The Invisibility Of Women's Socio- Economic And Religious Roles In A Changing Balinese Society. In *Inequality, Crisis and Social Change in Indonesia*". RoutledgeCurzon Taylor & Francis Group.
- Nastiti, N. N., Firawati, T., Hieriej, E., & Prabandari, A. (2016). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia Studi Kasus: Analisis Implementasi Renstra BPBD Kabupaten Sleman di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. *Jurnal Dinamika Global*.
- Neumayer, E., & Plümper, T. (2007). The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002. *Annals of the Association of American Geographers*.
- Nurtjahyo. (2019). Perempuan Lebih Rentan Jadi Korban Bencana Alam Apa Yang Bisa Dilakukan. Retrieved April 25, 2020, from <https://theconversation.com/perempuan-lebih-rentan-jadi-korban-bencana-alam-apa-yang-bisa-dilakukan-107974>
- Parker, L. (2003). *From Subjects to Citizens: Balinese Villagers in the Indonesian Nation-State* (NIAS Press). Copenhagen: Routledge.
- Putra, I. N. D. (2011). *A literary mirror: Balinese reflections on modernity and identity in the twentieth century / I Nyoman Darma Putra*. Leiden: KITLV Press.
- Ray-Bennett, N. (2009). The Influence of Caste, Class and Gender in Surviving Multiple Disasters: A Case Study from Orissa, India. *Environmental Hazards*.
- Resilience Development Initiative. (2011). No Title. Retrieved from <https://www.rdi.or.id/>
- Rhoads, E. (2012). Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Sohrabizadeh, S. (2016). The Neglect of Women's Capacities in Disaster Management Systems in Iran: A Qualitative Study. *Indian Journal of Gender Studies*.
- Suryakusuma, J. I. (1996). The State and Sexuality in New Order Indonesia. In *Fantasiizing the Feminine in Indonesia*. Durham: Duke University Press.
- Suryakusuma, J. I. (2011). *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Twigg, J. (2004). *Disaster Risk Reduction: Mitigation And Preparedness In Development And Emergency Programming*. London.
- UNISDR. (2008). *Briefing Note: Climate Change and Disaster Risk Reduction*. Switzerland.
- UNISDR. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030*. Switzerland.
- Valdés, H. M. (2009). A Gender Perspective on Disaster Risk Reduction. In *Women, Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives*. SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Vickers, A. (2012). *Bali Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wirata, P. (2007, April 8). *Reinkarnasi konflik 1920-an*. Retrieved from Kompas
- Zen, M. T., & Hadikusumo, D. (1964). Preliminary report on the 1963 eruption of Mt. Agung in Bali (Indonesia). *Bulletin Volcanologique*.